

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Bagi perusahaan yang dalam melakukan aktivitas bisnisnya berorientasi pada profit, laba dijadikan sebagai salah satu indikator penting yang menjadi fokus bagi manajemen. Hal ini dikarenakan laba dinilai mampu merefleksikan kinerja perusahaan melalui tingkat profitabilitas yang mengindikasikan bahwa perusahaan mampu untuk menutup semua biaya operasinya dan menghasilkan *return* bagi para pemegang saham dalam suatu periode tertentu. Secara konseptual, definisi laba terbagi menjadi dua, yakni laba ekonomi dan laba akuntansi. Laba ekonomi dapat diartikan sebagai total arus kas dan perubahan nilai pasar atas aset bersih perusahaan, sedangkan laba akuntansi didefinisikan sebagai pengukuran laba berdasarkan konsep akrual melalui pengakuan pendapatan (*revenue recognition*) dan penyesuaian beban (*expense matching*). Pengakuan pendapatan dapat dilakukan apabila perusahaan telah menerima kas atau pengakuan piutang yang sah serta menyelesaikan obligasinya kepada pelanggan. Ketika pendapatan telah diakui, maka biaya yang terkait untuk menghasilkan pendapatan tersebut akan disesuaikan.

Laba akuntansi juga berbeda dengan laba ekonomi dari sisi peraturan. Laba akuntansi diukur berdasarkan seperangkat aturan berupa standar akuntansi yang terkadang membutuhkan estimasi dalam penentuan nilai, sehingga menimbulkan perlakuan yang berlainan antara transaksi satu dengan yang lainnya serta memperbesar potensi pihak manajemen untuk menerapkan manajemen laba melalui laporan keuangan dalam rangka pemenuhan atas kepentingan pribadinya. Manajemen laba merujuk pada suatu tindakan yang dilakukan oleh manajer untuk memanipulasi laba sehingga menyebabkan distorsi atas laba akuntansi yang tidak merefleksikan keadaan ekonomi yang sesungguhnya terdapat di perusahaan (Subramanyam, 2014, hlm. 92–94). Alasan manajer perusahaan melakukan manajemen laba dapat dikaji melalui dua perspektif, yakni perspektif pelaporan keuangan dan perspektif kontrak. Perspektif pelaporan keuangan meninjau bahwa

manajemen laba yang dilakukan manajer ditujukan untuk penghindaran atas penyajian informasi kerugian yang akan berdampak pada kegagalan untuk memenuhi ekspektasi investor. Di sisi lain, perspektif kontrak meninjau bahwa manajemen laba dapat menjadi suatu alat proteksi bagi perusahaan dari kemungkinan timbulnya peristiwa di masa depan akibat adanya kontrak (Scott, 2015, hlm. 444–445).

Di Indonesia, praktik manajemen laba masih kerap terjadi dan tidak jarang menimbulkan dampak negatif, baik bagi perusahaan yang melakukannya maupun bagi *stakeholder* yang menggunakan laporan keuangan. Salah satu kasus manajemen laba di Indonesia terjadi pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, atau yang lebih familiar disebut sebagai Bank BTN, di mana Bank BTN mengalami penurunan atas laba tahun 2019 sebesar 92,55% secara tahunan dari laba periode 2018. Penurunan laba tersebut disinyalir merupakan dampak yang ditimbulkan atas praktik manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Pada tahun 2018, Bank BTN mampu mencetak laba sebesar Rp 2,81 triliun, namun pada 2019 laba yang berhasil dibukukan hanya sebesar Rp 209,26 miliar. Pihak Bank BTN menjelaskan bahwa penurunan laba tersebut dikarenakan perseroan sedang menyiapkan untuk implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 yang mengatur tentang Instrumen Keuangan hingga adanya tingkat likuiditas perbankan yang lebih ketat, sehingga perusahaan tengah menyesuaikan tingkat kolektibilitas kredit melalui penghapusan kredit bermasalah dan peningkatan *loan loss provision* (Bisnis.com, 2020).

Namun, kontradiktif dengan pernyataan tersebut, Komisi XI DPR RI mencurigai adanya praktik manajemen laba sebagai penyebab penurunan laba Bank BTN. Hal ini berkaitan dengan adanya kredit yang diberikan kepada PT Batam Island Marina (BIM), di mana PT BIM mengajukan jaminan kredit berupa piutang senilai Rp 400 miliar yang ternyata piutang tersebut tidak valid (Detik.com, 2020). Pemberian kredit sebesar Rp100 miliar kepada PT BIM pada bulan Desember 2014 tidak digunakan untuk pengembangan proyek, melainkan digunakan untuk melunasi piutang kepada pemegang saham. Selanjutnya, penambahan pinjaman sebesar Rp 200 miliar pada September 2015 kepada PT

BIM tidak dilakukan melalui proses *due diligence*. Akibat dari kredit macet PT BIM, Bank BTN melakukan manajemen laba untuk dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham dengan cara memindahtangankan kredit macet tersebut kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (Wartaekonomi.co.id, 2020).

Sejalan dengan kasus tersebut, menurut Ab-Hamid et al. (2018), manajemen laba pada sektor perbankan kerap dilakukan melalui cadangan kerugian pinjaman yang tak tertagih atau sering dikenal sebagai *loan loss provision*. Hal ini dikarenakan *loan loss provision* merupakan metode utama bagi perbankan untuk menutupi kerugian akibat pinjaman yang tidak dapat tertagih, serta merupakan indikator yang dapat mencerminkan stabilitas perusahaan. Kerugian yang dapat ditimbulkan oleh adanya manajemen laba dalam laporan keuangan tidak hanya berdampak pada potensi kegagalan untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham, namun juga berdampak terhadap efisiensi sumber daya perusahaan, di mana ketika manajemen laba di suatu perusahaan cukup tinggi, maka efisiensi sumber daya akan menjadi lebih rendah.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kredit macet, baik yang dihapus maupun direstrukturisasi, memiliki dampak negatif terhadap arus kas dan likuiditas perusahaan. Kredit macet menyebabkan tidak adanya arus kas masuk dari pembayaran pokok dan bunga pinjaman, sehingga dapat berdampak pada kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang. Terlebih lagi, masa pandemi COVID-19 yang terjadi sejak kuartal pertama tahun 2020 hingga saat ini dapat dijadikan momentum bagi perbankan untuk melakukan restrukturisasi kredit karena adanya relaksasi peraturan yang diberikan pemerintah berupa stimulus-stimulus dengan tujuan agar bank dapat menunjukkan laporan laba yang lebih baik. Meskipun demikian, kreditur yang memberikan pinjaman tentunya memiliki analisa mengenai kinerja keuangan bank yang sebenarnya tanpa adanya relaksasi, sehingga arus kas dan likuiditas bank yang sebenarnya tanpa adanya restrukturisasi kredit yang masif akan diketahui oleh kreditur (Tempo.co, 2020). Adanya regulasi tertentu yang spesifik hanya berlaku di industri perbankan, seperti terkait rasio kecukupan modal atau insentif yang tinggi mengenai skema kompensasi, manajemen laba yang ada di industri perbankan dapat terjadi. Di

industri perbankan, manajemen laba berbasis akrual biasanya dilakukan melalui perubahan metode penyusutan atau perkiraan cadangan kerugian pinjaman (Abbas, 2018).

Berdasarkan teori keagenan, manajemen laba dapat disebabkan oleh adanya perbedaan kepemilikan informasi antara manajer sebagai pihak internal perusahaan dengan pemegang saham dan *stakeholder* lainnya sebagai pihak eksternal, di mana keadaan tersebut dikenal sebagai asimetri informasi. Asimetri informasi terjadi ketika distribusi informasi antara manajer dengan pemegang saham tidak seimbang. Ketika manajemen mengetahui informasi yang lebih komprehensif mengenai kondisi internal perusahaan, maka mereka cenderung berupaya untuk menutupi informasi-informasi mengenai problematika yang terjadi di perusahaan melalui manipulasi laba untuk menarik lebih banyak investor. Sedangkan, pemegang saham memiliki keterbatasan informasi dan tidak dapat mengetahui laba perusahaan yang sebenarnya akibat cukup tingginya pengeluaran yang harus dibayarkan untuk melakukan *monitoring* terhadap perilaku manajemen (Dai et al., 2013). Namun, tidak sejalan dengan teori, hasil penelitian Evodila et al. (2020) menyatakan bahwa asimetri informasi berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Bagi perusahaan yang telah memperdagangkan sahamnya di pasar modal, ekspektasi utama setelah melakukan penawaran umum perdana (IPO) adalah peningkatan ekuitas perusahaan. Namun, apabila ekspektasi tersebut tidak terpenuhi, maka dapat berdampak pada kerugian baru secara riil di perusahaan akibat timbulnya biaya keagenan, dan peningkatan ukuran perusahaan. Di sisi lain, hasil penelitian Ghani et al. (2017) menyatakan bahwa asimetri informasi tidak berdampak signifikan terhadap manajemen laba. Manajemen mungkin tidak memiliki kesempatan dalam memanfaatkan asimetri informasi untuk memperoleh keuntungan pribadi dikarenakan adanya pengendalian internal yang baik di perusahaan (Nursiam & Widyaningrum, 2021).

Terjadinya asimetri informasi di antara manajer dengan pemegang saham dapat memicu terjadinya masalah keagenan, salah satunya masalah yang berkaitan dengan kebijakan dividen yang akan dibagikan perusahaan. Besar dividen yang dibayarkan oleh suatu perusahaan kepada para investor tidak terlepas dari

terdapatnya kebijakan dividen di perusahaan tersebut. Kebijakan dividen merujuk pada kebijakan manajemen perusahaan mengenai besaran proporsi laba yang hendak didistribusikan sebagai tingkat pengembalian kepada pemegang saham serta proporsi laba yang hendak ditahan perusahaan untuk tujuan pendanaan (Ahmed et al., 2018). Dalam rangka merespon tekanan dari pemegang saham agar perusahaan memberikan dividen, maka manajemen perusahaan berusaha untuk meningkatkan laba di dalam laporan keuangannya (Nguyen & Bui, 2019). Hasil penelitian Im et al. (2016) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pembayaran dividen akan menimbulkan perilaku oportunistik manajer yang semakin tinggi pula untuk melaksanakan manajemen laba karena manajer akan berupaya untuk mempertahankan laba yang cukup untuk melakukan pembayaran dividen. Selain itu, penelitian Rahmawati & Fajri (2021) menyatakan bahwa kebijakan dividen mampu menjadi alat bagi manajer untuk menanggulangi isu mengenai manajemen laba di perusahaan, karena apabila perusahaan membayarkan dividen yang besar, maka akan mensinyalkan kepada investor bahwa stabilitas perusahaan juga tinggi. Perusahaan yang stabil dinilai memiliki mekanisme yang baik terkait *monitoring* yang dilakukan oleh pemegang saham sehingga tingkat manajemen laba menjadi rendah. Namun, kontra dengan yang telah dijelaskan pada hasil penelitian sebelumnya, hasil penelitian Sari & Khafid (2020) menerangkan bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba karena penetapan keputusan mengenai nilai dividen yang akan didistribusikan dilakukan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sehingga tidak hanya manajemen yang memiliki kuasa untuk menentukan besaran dividen, melainkan juga pemegang saham. Hal tersebut menyebabkan kapasitas manajemen untuk memengaruhi besaran dividen yang akan dibayarkan menjadi terbatas.

Selain itu, manajemen laba disinyalir dapat terjadi karena lemahnya pengimplementasian tata kelola (*corporate governance*) yang baik di perbankan. Bank yang telah menerapkan *corporate governance* dengan baik cenderung jarang melaporkan laba yang kecil karena adanya pembatasan perilaku untuk melakukan manipulasi laba melalui akrual diskresioner, *loan loss provision*, maupun keuntungan atau kerugian saham realisasian (Leventis & Dimitropoulos, 2012).

Fenomena terkait *corporate governance* yang terjadi di sektor perbankan juga terjadi pada PT Bank Maybank Indonesia Tbk, di mana Maybank terlibat kasus hilangnya uang nasabah sebesar Rp 22 miliar. Kasus tersebut bermula ketika nasabah yang bernama Winda Earl membuka rekening deposito berjangka melalui kepala cabang di salah satu kantor cabang Maybank. Namun, kepala cabang tersebut memalsukan semua data nasabah serta menarik dana nasabah tanpa izin untuk kemudian diputar dengan harapan memperoleh keuntungan (Kompas.com, 2020). Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa Maybank diduga melakukan praktik *shadow banking*, yakni melakukan kegiatan menyediakan jasa perantara keuangan yang tidak sesuai dengan aturan, di mana sebagai lembaga yang melakukan pengumpulan dana dari nasabah seharusnya setiap dana yang masuk harus dikelola langsung sebagai pinjaman atau kebutuhan debitur lainnya (Inews.id, 2020). Kasus Maybank tersebut menunjukkan bahwa adanya indikasi implementasi *corporate governance* yang lemah karena longgarnya mekanisme pengawasan manajemen terhadap perilaku karyawan sehingga terjadi hal-hal yang merugikan nasabah maupun bank.

Pada hakikatnya, *corporate governance* diterapkan pada suatu perusahaan dengan tujuan untuk memenuhi obligasi-obligasi tertentu yang harus dilakukan perusahaan terhadap pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. *Corporate governance* memiliki peran untuk memengaruhi perilaku manajer baik secara langsung melalui pemberian insentif, maupun secara tidak langsung melalui pengawasan. Insentif berupa bonus biasanya diberikan kepada manajer ketika kinerja mereka telah mencapai batas tertentu. Sedangkan, mekanisme pengawasan dapat dilakukan dengan memisahkan peran direksi dengan dewan komisaris serta meningkatkan jumlah pihak independen dalam susunan kepengurusan perusahaan. Melalui *corporate governance* yang diterapkan dengan baik di perusahaan, perilaku oportunistik manajer untuk mengambil keuntungan pribadi dari perusahaan dapat ditekan karena adanya pengawasan dari pemegang saham yang kuat (Elbadry et al., 2015). Pengawasan yang dilakukan oleh pemegang saham dapat berdampak pada menurunnya tingkat asimetri informasi yang terjadi karena pemegang saham dan manajer sama-sama mengetahui kondisi perusahaan yang

sebenarnya. Tingkat asimetri informasi yang lebih rendah tentunya dapat berdampak pada lebih rendahnya peluang manajer untuk melakukan manajemen laba, sehingga laba yang dilaporkan oleh perusahaan dapat lebih mencerminkan kinerja manajer dan perusahaan yang sebenarnya.

Di samping itu, ketika perusahaan menghasilkan laba, maka kelompok investor tertentu cenderung menuntut perusahaan agar sebagian dari laba tersebut dibagikan kepada mereka dalam bentuk dividen sebagai imbal hasil atas modal yang telah diinvestasikan. Sehingga, manajer berupaya untuk mempertahankan laba pada tingkat tertentu untuk meminimalisir turunnya nilai dividen yang dibagikan melalui manajemen laba. Namun, di sisi lain, kelompok investor lainnya cenderung menginginkan tingkat dividen yang rendah bahkan tidak menginginkan perusahaan untuk membagikan dividen dengan berbagai alasan tertentu, sehingga manajemen laba yang dilakukan oleh manajer untuk mempertahankan nilai dividen yang akan dibayarkan tidak dapat memenuhi ekspektasi dan kepentingan dari kelompok pemegang saham tersebut. Dalam hal ini, penerapan *corporate governance* yang baik dinilai dapat meminimalisir terjadinya manajemen laba yang diakibatkan oleh pembayaran dividen sehingga kepentingan dari masing-masing kelompok pemegang saham dapat diselaraskan. Hal ini dikarenakan penetapan kebijakan dividen dilakukan pada saat RUPS, sehingga yang berperan dalam menentukan kebijakan dividen tidak hanya terbatas pada manajemen, melainkan juga pemegang saham (Dahayani et al., 2017). Sehingga, apabila laba yang dilaporkan perusahaan tidak dimanipulasi, maka kebijakan dividen yang dibuat oleh perusahaan lebih mampu untuk mengakomodir kepentingan dari berbagai kelompok investor.

Praktik manajemen laba yang diterapkan oleh manajemen perusahaan juga tidak terlepas dari karakteristik fundamental perusahaan seperti *leverage* dan *firm's growth*. *Leverage* merupakan proporsi utang yang terdapat dalam struktur modal perusahaan (Subramanyam, 2014, hlm. 565). Berdasarkan hipotesis utang yang terdapat dalam *Positive Accounting Theory*, manajer cenderung memiliki tujuan untuk melaksanakan praktik manajemen laba agar perusahaan terhindar dari penyimpangan terhadap kontrak utang (*debt covenant*), sehingga tingginya

leverage akan semakin memotivasi manajer untuk melaksanakan manajemen laba (Khanh & Thu, 2019). Semakin tinggi *leverage* perusahaan juga akan meningkatkan risiko perbankan, sehingga akan berdampak pula pada kenaikan kecukupan modal yang lebih tinggi, sehingga manajer akan melakukan manajemen laba melalui penggunaan berbagai kebijakan akuntansi untuk meningkatkan laba (Moghaddam & Abbaspour, 2017).

Firm's growth merupakan nilai yang menunjukkan bahwa perusahaan telah mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu hingga saat ini. Tingkat pertumbuhan perusahaan yang tinggi cenderung memotivasi manajer untuk menurunkan laba dan mengalokasikannya ke periode di mana perusahaan mengalami penurunan laba (Alexander & Hengky, 2017). Sejalan dengan hal tersebut, perusahaan yang mengalami tingkat pertumbuhan yang pesat lebih terdorong untuk melakukan manajemen terhadap profit yang dihasilkan dengan tujuan untuk menstabilisasi tren laba maupun pendapatannya (Harahap, 2021). *Firm's growth* yang diprosikan dengan pertumbuhan laba atau pendapatan dapat menjadi sinyal bagi investor untuk tetap mempertahankan investasinya di perusahaan, sehingga untuk menjaga kestabilan pertumbuhan laba, manajer melakukan strategi manajemen laba (Hapsoro & Annisa, 2017).

Pelaksanaan penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya tingkat manajemen laba yang terjadi pada perusahaan perbankan di Indonesia, sehingga penelitian ini mengkaji mengenai praktik manajemen laba di perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Selain itu, penelitian terdahulu masih menunjukkan hasil yang inkonsisten mengenai pengaruh asimetri informasi dan kebijakan dividen dengan *corporate governance* sebagai variabel moderasi. Penelitian dari Tran (2020) menjadi acuan utama pada penelitian ini dengan beberapa perbedaan penggunaan variabel dan pengukuran. Perbedaan tersebut di antaranya yakni: (1) studi dilakukan pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia; (2) menggunakan model manajemen laba yang dikembangkan oleh Beaver & Engel (1996); (3) menggunakan *dividend payout ratio* untuk mengukur kebijakan dividen; (4) menggunakan *bid-ask spread* untuk mengukur asimetri informasi; (5) menambahkan variabel moderasi berupa

corporate governance; serta (6) menggunakan *leverage* dan *firm's growth* sebagai variabel kontrol.

Dimotivasi oleh fenomena yang tengah terjadi serta inkonsistensi hasil penelitian, maka peneliti berminat untuk melaksanakan penelitian mengenai pengaruh asimetri informasi dan kebijakan dividen yang dimoderasi oleh *corporate governance* pada sektor perbankan dengan mengkombinasikan beberapa proksi pengukuran yang berbeda dengan judul **“Corporate Governance Memoderasi Hubungan Antara Asimetri Informasi dan Kebijakan dividen Terhadap Manajemen Laba”**.

I.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang, maka rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap manajemen laba?
- b. Apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap manajemen laba?
- c. Apakah *corporate governance* mampu memoderasi hubungan antara asimetri informasi terhadap manajemen laba?
- d. Apakah *corporate governance* mampu memoderasi hubungan antara kebijakan dividen terhadap manajemen laba?

I.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menguji secara empiris pengaruh asimetri informasi terhadap manajemen laba.
- b. Untuk menguji secara empiris pengaruh kebijakan dividen terhadap manajemen laba.
- c. Untuk menguji secara empiris bahwa *corporate governance* memoderasi hubungan antara asimetri informasi terhadap manajemen laba.

- d. Untuk menguji secara empiris bahwa *corporate governance* memoderasi hubungan antara kebijakan dividen terhadap manajemen laba.

I.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan permasalahan pada latar belakang serta tujuan yang ingin dicapai, berikut ini adalah beberapa manfaat yang diharapkan mampu dihasilkan dari penelitian ini:

- a. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur akuntansi agar lebih ekstensif mengenai pengaruh asimetri informasi dan kebijakan dividen terhadap manajemen laba dengan *corporate governance* sebagai variabel moderasi. Selain itu, dengan mempertimbangkan variabel-variabel yang tidak diteliti pada penelitian ini, diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya mengenai topik manajemen laba.

- b. Aspek Praktis

- 1) Bagi Pengguna Laporan Keuangan

Menyediakan informasi yang dapat dijadikan sebagai salah satu dasar bagi para pengguna laporan keuangan untuk mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan terkait investasi atau hal-hal lainnya merupakan salah satu manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini.

- 2) Bagi Regulator

Mengingat potensi timbulnya implikasi negatif dari manajemen laba yang disebabkan oleh berbagai faktor, terutama *corporate governance*, asimetri informasi, dan kebijakan dividen, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan regulasi untuk melindungi investor dan pengguna laporan keuangan lainnya.